

# Kontribusi Mahasiswa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara

Ala Rowanda<sup>1</sup>, Irwan Suriadi<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

\*e-mail: [alarowanda60@gmail.com](mailto:alarowanda60@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwansuryadi@unram.ac.id](mailto:irwansuryadi@unram.ac.id)<sup>2</sup>

Riwayat Artikel	Abstrak
<p>Diterima: 01 Juni 2025 Direvisi: 12 Juni 2025 Diterbitkan: 15 Juni 2025</p> <hr/> <p><b>Kata kunci:</b> BKAD, Pengabdian Masyarakat, Pengelola Keuangan Daerah, RKA-SKPD, SIPD</p>	<p><i>Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara akuntabel, salah satunya melalui Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mendukung proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara. Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dilibatkan secara aktif dalam berbagai tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah melalui pendekatan kolaboratif partisipatif. Selama empat bulan pelaksanaan, mahasiswa tidak hanya mengikuti proses diseminasi pengetahuan teknis melalui rapat dan penyusunan dokumen Renstra serta pohon kinerja, tetapi juga terlibat langsung dalam penginputan data RKA ke aplikasi SIPD. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa mampu meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas output dokumen, sekaligus memberikan pengalaman praktis yang relevan bagi pengembangan kompetensi akademik. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.</i></p>
	<p><i>This work is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a></i></p>

## 1. PENDAHULUAN.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan salah satu instrumen penting

yang menentukan efektivitas implementasi program pembangunan daerah. RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD (Nuzulia, 1967).

Proses penyusunan RKA-SKPD memerlukan ketelitian tinggi dan pemahaman

yang komprehensif terhadap berbagai aspek teknis penganggaran. Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) diharapkan dapat menghasilkan output berupa pembangunan daerah merata dan berkelanjutan di dasari oleh aspek transparansi dan partisipasi. Kompleksitas teknis ini seringkali menjadi tantangan bagi institusi pemerintah daerah, khususnya yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan penganggaran (Manoppo & Walandouw..., 2019).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu SKPD yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan serupa. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah, BKAD dituntut untuk mampu menyusun RKA-SKPD yang berkualitas, akurat, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Formulir RKA SKPD dan RKA PPKD merupakan formulir untuk merencanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan pengelola keuangan daerah, sehingga kompleksitas teknis dan tuntutan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen anggaran tersebut memerlukan dukungan tambahan untuk memastikan kualitas output yang dihasilkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat

di perguruan tinggi merupakan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah.

Peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran praktis yang berharga bagi mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa sebagai manusia terdidik yang dibentuk di perguruan tinggi tentunya harus diuji kematangannya dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi, salah satunya dengan melaksanakan pengabdian masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, mahasiswa dari program studi terkait seperti Akuntansi, Administrasi Publik, dan Ekonomi memiliki kompetensi akademis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyusunan RKA-SKPD (Syaiful, 2023).

Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah daerah dalam bentuk pengabdian masyarakat telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya, saran kebijakan, dan akses ke masyarakat yang membutuhkan bantuan. Perguruan tinggi dapat memberikan insentif,

pengakuan, dan penilaian yang sesuai untuk mahasiswa yang terlibat dalam berbagai proyek pengabdian masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat yang termanfaatkan secara maksimal bagi pengembangan ilmu lebih lanjut, bagi masyarakat, pemerintah, dan industri. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi harus terlibat dalam meningkatkan daya saing bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi dapat berkontribusi untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah seperti penyusunan RKA-SKPD merupakan implementasi nyata dari peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam penyusunan RKA-SKPD di BKAD Kabupaten Lombok Utara menjadi sangat relevan dan strategis. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi BKAD dalam menyelesaikan tugas penyusunan anggaran, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah secara langsung.

## **2. METODE.**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Bidang Sekretariat Sub Bagian Program dan Pelaporan. Kegiatan berlangsung selama 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Februari hingga Juni 2024.

Penempatan mahasiswa di Sub Bagian Program dan Pelaporan dipilih secara strategis mengingat unit kerja ini memiliki peran sentral dalam proses penyusunan dan monitoring RKA-SKPD.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kolaboratif partisipatif. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif dikembangkan sebagai solusi dari kelemahan pendekatan top-down. Dengan melibatkan berbagai pihak yang punya kepentingan dan latar belakang pengetahuan berbeda, proses perencanaan jadi lebih terbuka, merata, dan mendorong munculnya ide-ide yang lebih kreatif dan relevan (Imanda, n.d.2024), dimana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat tetapi turut aktif terlibat dalam proses kerja sehari-hari BKAD. Desain kegiatan ini menggabungkan konsep *learning by doing* dengan *community service*, sehingga mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata sambil memperoleh pengalaman praktis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini terdiri atas empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Pada tahap persiapan, dilakukan sosialisasi oleh pihak kampus, seleksi mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu, dan pembekalan terkait etika kerja, komunikasi, serta pemahaman teknis mengenai instansi mitra. Tahap pelaksanaan dilakukan di Sub Bagian Program dan Pelaporan BKAD, di mana mahasiswa menjalankan berbagai tugas administratif seperti mengurus surat disposisi, membantu legalisasi dokumen keuangan (RAK, RKA, dan DPA), melakukan pendataan pegawai, serta membantu penyusunan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) BKAD Tahun 2025–2029. Selanjutnya, tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) melalui komunikasi daring secara berkala untuk memastikan kelancaran kegiatan, serta evaluasi akhir berdasarkan laporan kegiatan dan umpan balik dari pihak

instansi. Tahap terakhir adalah pelaporan, di mana mahasiswa diwajibkan menyusun laporan pengabdian masyarakat dan menghasilkan artikel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 1. Rencana Tahap Kegiatan Pengabdian

Tahapan	Waktu	Kegiatan	Rincian Singkat
Persiapan	Minggu 1–2	Orientasi & Pembekalan	Pengenalan struktur, tupoksi, regulasi RKA-SKPD, serta ekspektasi kegiatan.
Persiapan	Minggu 1–2	Identifikasi Kebutuhan	Diskusi pemetaan kebutuhan dan penentuan fokus kontribusi mahasiswa.
Pelaksanaan	Minggu 3–15	Kegiatan Operasional	Terlibat dalam penyusunan, verifikasi, dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
Pelaksanaan	Minggu 3–15	Kontribusi Substantif	Analisis program, dukungan Monev, penggunaan aplikasi keuangan, dan bahan rapat.
Pelaksanaan	Minggu 3–15	Transfer Pengetahuan	Pertukaran wawasan teoritis dan praktis antara mahasiswa dan staf BKAD.
Monitoring & Evaluasi	Minggu 14–16	Evaluasi Berkala	Penilaian kontribusi, feedback staf, dan refleksi pembelajaran mahasiswa.
Monitoring & Evaluasi	Minggu 14–16	Dokumentasi Kegiatan	Pencatatan aktivitas, dokumentasi hasil, dan penyusunan laporan akhir.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara selama empat bulan dari Februari hingga Juni 2024 dengan melibatkan satu orang mahasiswa sebagai kontributor utama. Kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang merupakan dokumen memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat

rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu Diseminasi Pemahaman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah, serta Praktik Langsung Penyusunan dan Penginputan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD. Berikut penjabaran dari masing-masing tahapan:

### 3.1 Diseminasi Pemahaman Teknis Penyusunan Dokumen

Pada tahap awal kegiatan, mahasiswa melakukan proses adaptasi dan identifikasi tugas-tugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara. Diseminasi pengetahuan ini terjadi melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengikuti berbagai rapat dan koordinasi internal instansi, terutama dalam rapat penyusunan *Pohon Kinerja*. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa mengikuti lima kali pertemuan yang terbagi atas rapat koordinasi, penyusunan indikator kinerja, hingga evaluasi dan finalisasi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga aktif dalam pencatatan hasil diskusi, dokumentasi indikator kinerja, serta membantu menyiapkan bahan presentasi.



Gambar 1. Rapat penyusunan pohon kinerja di BKAD

Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pemahaman awal tentang struktur dan isi dokumen Rencana Strategis (Renstra) melalui pelibatan dalam proses pengetikan dan penyusunan tabel-tabel penting, seperti permasalahan PD, isu lingkungan strategis, dan prioritas pembangunan. Dalam konteks ini, mahasiswa

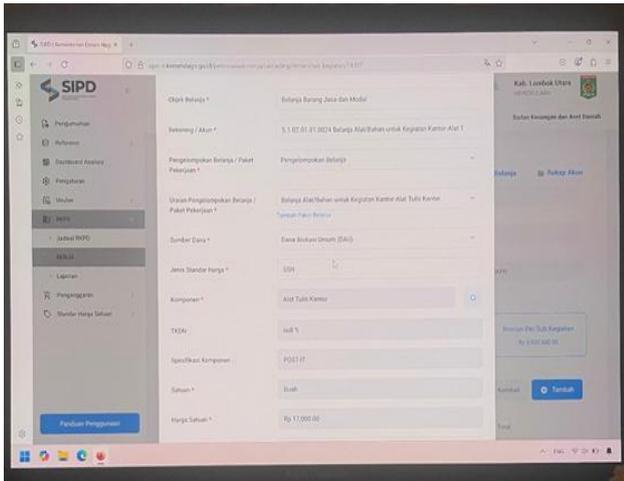
memahami pentingnya konsistensi format, akurasi data, serta kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan perencanaan strategis jangka menengah yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

PILIHAN STRATEGIS YANG MELURUSKAN KEWAJIBAN PD	PERMASALAHAN STRATEGIS	ISU ALIAS YANG BERKAITAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERKAITAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Tingkat kemampuan keuangan dan aset daerah secara keseluruhan berdasarkan APBD	2. Ketersediaan anggaran PD	3. Isu URP yang relevan dengan PD	4. Perubahan kebijakan nasional	5. Isu seperti program, kebijakan, dan lain-lain	6. Praktek yang baik, benar, dan sesuai	7. RKA perlu terus berproses dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi
8. Ketersediaan anggaran APBD	9. Ketersediaan anggaran APBD	10. Isu URP yang relevan dengan PD	11. Perubahan kebijakan nasional	12. Isu seperti program, kebijakan, dan lain-lain	13. Praktek yang baik, benar, dan sesuai	14. RKA perlu terus berproses dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

Gambar 2. Tabel Renstra BKAD yang disusun bersama mahasiswa dan staf.

### 3.2 Praktik Langsung Penyusunan dan Penginputan Dokumen

Tahap kedua dari kegiatan adalah praktik langsung penyusunan dan penginputan data Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mahasiswa membantu proses entri data dari beberapa SKPD berdasarkan Dokumen Anggaran Tahun 2025 sebagai referensi awal penyusunan RKA Tahun 2026. Kegiatan ini mencakup penginputan rencana pendapatan, belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga pembiayaan untuk SKPD yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).



Gambar 3. Mahasiswa Menginput RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD.

Meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan harga satuan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan, mahasiswa tetap memastikan bahwa data yang diinput memiliki tingkat akurasi dan kelengkapan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa juga berkoordinasi dengan pegawai bidang anggaran untuk menyesuaikan format dan memastikan keterpaduan antara dokumen Renstra, pohon kinerja, dan RKA SKPD.

Selama empat bulan pelaksanaan kegiatan, mahasiswa secara aktif berkontribusi dalam berbagai proses teknis dan administratif di lingkungan BKAD. Keikutsertaan ini memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana proses penyusunan dokumen anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk alur birokrasi, penggunaan aplikasi SIPD, serta pentingnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Kegiatan ini membuktikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam instansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung percepatan penyelesaian dokumen strategis daerah. Selain itu, pengalaman ini

memperkuat peran mahasiswa sebagai mitra aktif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ke depan, BKAD Kabupaten Lombok Utara dapat mengembangkan bentuk kerja sama lanjutan dengan perguruan tinggi, khususnya dalam rangka meningkatkan peran serta mahasiswa. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan sistem informasi atau dashboard interaktif yang menyajikan data anggaran secara visual dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat juga dapat diperluas dengan melibatkan mahasiswa dalam analisis efektivitas dan efisiensi belanja daerah, termasuk mengidentifikasi peluang penghematan atau pengalokasian sumber daya secara lebih optimal. Program magang yang dirancang secara terstruktur dengan durasi yang lebih panjang juga dapat menjadi alternatif, agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendalami bidang anggaran atau pengelolaan aset secara lebih mendalam, serta berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan daerah secara komprehensif.

#### 4. KESIMPULAN.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara selama kurun waktu empat bulan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) mampu memberikan kontribusi nyata baik terhadap efektivitas kerja instansi maupun penguatan kapasitas akademik dan

profesional mahasiswa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan struktur dokumen perencanaan dan penganggaran daerah seperti Renstra, pohon kinerja, dan RKA-SKPD, tetapi juga mampu terlibat aktif dalam proses teknis penyusunan dan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem birokrasi pemerintahan daerah.

Kelebihan dari kegiatan ini terletak pada terbangunnya sinergi antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan teknis birokrasi daerah, di mana mahasiswa mampu beradaptasi secara cepat, menunjukkan tanggung jawab, serta memberikan dukungan administratif yang konkret dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin maupun strategis. Selain itu, pengalaman ini juga memberikan pemahaman lintas-disiplin, seperti pentingnya ketepatan data, konsistensi dokumen, serta pemahaman alur kebijakan publik di tingkat daerah.

Namun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan ruang lingkup peran mahasiswa yang masih dibatasi pada fungsi asistensi, serta tantangan teknis seperti perubahan harga satuan belanja yang memerlukan penyesuaian cepat dalam sistem. Keterbatasan waktu dan jumlah mahasiswa yang terlibat juga menjadi hambatan dalam memperluas cakupan kontribusi secara menyeluruh di seluruh bidang perencanaan.

Sebagai bentuk pengembangan ke depan, kegiatan serupa dapat ditingkatkan melalui model kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, melibatkan mahasiswa dalam jumlah lebih besar dengan sistem bimbingan

terstruktur, serta penguatan program magang atau pengabdian dengan dukungan pelatihan teknis awal. Dengan demikian, peran mahasiswa dalam membantu proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah tidak hanya mendukung efisiensi kerja instansi, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Utara yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pimpinan dan staf BKAD atas kerjasama, bimbingan, serta bantuan yang sangat berarti selama kegiatan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram atas dukungan yang diberikan selama proses kegiatan ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Bapak Irwan Suriadi, SE., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara berkelanjutan sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan jurnal pengabdian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA.

- Imanda, M. (n.d.). *Kolaborasi dan Partisipasi dalam Proses Perencanaan dan Perancangan*. 1-11.
- Manoppo, E. S., & Walandouw..., S. K. (2019).

- Analysis of Budget Planning (Rka-Skpd) in Financial and Asset Management Income in Sangihe Island Regency. *Jurnal EMBA*, 7(4), 4798–4807.
- Nuzulia, A. (1967). Pedoman Penyusunan Rka-Skpd/Rka Ppkd. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Syaiful, A. (2023). Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Masyarakat. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1), 29–34. <https://doi.org/10.53621/jider.v3i1.102>